

Nama : Yesi Novia Pitriani  
NPM : 2313031006  
Kelas : 23A  
Mata Kuliah : Ekonomi Pendidikan

## CASE STUDY

### SOAL KASUS

#### “Reformasi Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya”

Pemerintah Provinsi *Nusantara Raya* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Jumlah penduduk: 8 juta jiwa
- Anggaran pendidikan: 22% dari APBD
- 68% anggaran pendidikan digunakan untuk gaji dan tunjangan guru
- 12% untuk infrastruktur
- 8% untuk program bantuan siswa (beasiswa & subsidi)
- 12% untuk administrasi dan lainnya

Namun, hasil evaluasi menunjukkan:

- Skor literasi dan numerasi siswa berada di bawah rata-rata nasional
- Ketimpangan kualitas antara sekolah kota dan desa sangat tinggi
- Banyak sekolah memiliki guru berlebih di kota, tetapi kekurangan guru di daerah terpencil
- Infrastruktur digital sangat terbatas

Sebagai pembanding, pemerintah pusat ingin mendorong reformasi dengan merujuk praktik negara anggota OECD yang:

- Memiliki sistem *performance-based budgeting*
- Mengalokasikan dana berbasis kebutuhan siswa
- Mengutamakan peningkatan kualitas guru
- Menggunakan sistem evaluasi berbasis data

## **TUGAS ANDA**

Sebagai analis ekonomi pendidikan, Anda diminta menyusun rekomendasi kebijakan dengan menjawab pertanyaan berikut:

### **1) Analisis Struktur Pengeluaran**

- Apakah struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya sudah efisien?

Struktur belanja pendidikan di Provinsi Nusantara Raya belum efisien karena terlalu besar proporsinya untuk gaji dan tunjangan guru (68%) sehingga menyisakan ruang anggaran yang sangat kecil untuk program yang langsung meningkatkan kualitas belajar siswa. Ketika 68% anggaran pendidikan hanya untuk gaji guru, maka hanya tersisa 32% untuk infrastruktur, bantuan siswa, dan administrasi. Hal ini bermasalah karena bukti empiris menunjukkan bahwa daerah yang menghabiskan lebih dari 75% anggaran pendidikan untuk gaji memiliki hasil belajar siswa yang rendah, sementara belanja nongaji seperti infrastruktur, bantuan siswa, dan pelatihan guru terbukti lebih berdampak pada peningkatan literasi dan numerasi.

- Bagian mana yang perlu direalokasi? Mengapa?

Bagian yang perlu direalokasi adalah administrasi dari 12% menjadi 6% untuk menghemat 6% anggaran, infrastruktur dari 12% menjadi 20% untuk perbaikan digital dan fisik sekolah, serta bantuan siswa dari 8% menjadi 14% untuk beasiswa dan subsidi siswa desa yang lebih memadai. Gaji guru dapat dipertahankan di kisaran 60% dengan efisiensi melalui redistribusi guru yang lebih merata. Alasannya adalah ketimpangan kualitas antara sekolah kota dan desa sangat tinggi, banyak sekolah di kota kelebihan guru tetapi daerah terpencil kekurangan guru, dan infrastruktur digital sangat terbatas, semua masalah ini tidak bisa diatasi dengan hanya membayar gaji guru tanpa mengalokasikan dana untuk program produktif.

### **2) Analisis Sumber Pembiayaan**

- Apakah pembiayaan masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah?

Pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah karena seluruh anggaran pendidikan bersumber dari APBD dengan 68% terkunci untuk gaji guru, sehingga daerah tidak memiliki fleksibilitas anggaran untuk program peningkatan kualitas seperti pelatihan guru, digitalisasi sekolah, atau beasiswa siswa berprestasi. Dengan anggaran pendidikan hanya 22% dari APBD dan mayoritas untuk gaji, akibatnya daerah kekurangan program inovatif yang bisa dijalankan tanpa sumber pembiayaan tambahan.

- Perlukah melibatkan sektor swasta atau skema pembiayaan alternatif? Jelaskan model yang tepat.

Pemerintah daerah perlu melibatkan sektor swasta dan mencari sumber dana lain karena pemerintah daerah tidak cukup uang untuk menanggung semua biaya peningkatan kualitas pendidikan sendiri. Model yang tepat adalah kerjasama pemerintah dengan swasta, di mana swasta membangun fasilitas digital sekolah seperti lab komputer dan WiFi, kemudian pemerintah membayar sewa secara cicilan selama 5 tahun sehingga tidak perlu keluar uang besar di awal. Selain itu, dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR bisa dialokasikan untuk beasiswa siswa desa dan pelatihan guru, misalnya perusahaan tambang memberikan dana beasiswa untuk 100 siswa miskin di desa. Donor internasional juga bisa dilibatkan melalui bantuan berbasis hasil, di mana organisasi luar negeri akan memberi uang jika hasilnya bagus, seperti jika skor literasi siswa naik maka donor akan bayar sesuai kesepakatan.

### 3) Perbandingan dengan Negara OECD

- Elemen apa dari praktik negara OECD yang realistis diadopsi?

Elemen dari praktik negara OECD yang realistis diadopsi di Nusantara Raya adalah:

1. alokasi dana berbasis kebutuhan siswa dengan formula dana per siswa dikalikan faktor kemiskinan dan faktor jarak yang bisa langsung diterapkan.
2. pengutamaan peningkatan kualitas guru melalui program pelatihan wajib dan insentif kinerja yang sudah sejalan dengan Program Guru Penggerak Kemendikbud.
3. sistem evaluasi berbasis data yang bisa mengintegrasikan Dapodik dengan Asesmen Nasional meskipun perlu penyederhanaan.
4. performance-based budgeting parsial yang sudah mulai diterapkan Kemenkeu tetapi perlu indikator yang lebih sederhana untuk kapasitas daerah.

- Apa tantangan implementasinya di konteks Indonesia?

Ada beberapa tantangan dalam menerapkan reformasi ini di Indonesia.

1. Kemampuan perencanaan daerah masih rendah, sekitar 30% kabupaten bahkan tidak bisa menghabiskan seluruh anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan, jadi kalau dikenai sistem penganggaran yang rumit pasti akan gagal.
2. Data guru dan siswa tidak akurat, padahal tanpa data yang benar, program redistribusi guru dari kota ke desa terpencil tidak akan berjalan karena pemerintah tidak tahu guru mana yang berlebih dan desa mana yang kekurangan.

3. Politik lokal menghambat, karena bupati dan walikota lebih memilih mempertahankan keadaan yang ada dengan memprioritaskan pembayaran gaji guru PNS daripada berani mengambil risiko untuk program-program baru yang inovatif.
4. Kesenjangan akses internet yang besar, sekitar 68% desa masih sulit mengakses internet, sehingga untuk digitalisasi sekolah seperti menyediakan WiFi dan lab komputer butuh waktu lama dan biaya yang sangat besar.

#### **4) Rancangan Reformasi**

Susun proposal singkat reformasi pembiayaan pendidikan selama 5 tahun yang mencakup:

- Perubahan struktur belanja
- Strategi peningkatan kualitas guru
- Digitalisasi sekolah
- Mekanisme monitoring dan evaluasi

Rancangan Reformasi Pembiayaan Pendidikan 5 Tahun (2026–2030)

##### **Tujuan Reformasi:**

Dalam 5 tahun, skor literasi dan numerasi siswa Nusantara Raya harus setara dengan rata-rata nasional, ketimpangan kualitas antara sekolah kota dan desa turun 50%, dan 100% sekolah memiliki akses internet minimal.

##### **Perubahan Struktur Belanja:**

Di tahun pertama (2026), alokasi anggaran diubah dari gaji guru 68% menjadi 60%, infrastruktur naik dari 12% menjadi 20%, bantuan siswa naik dari 8% menjadi 14%, dan administrasi dipotong dari 12% menjadi 6%. Di tahun ke-5 (2030), gaji guru turun menjadi 50%, infrastruktur menjadi 30%, bantuan siswa tetap 15%, dan pelatihan guru dialokasikan 3% tersendiri. Uang yang dihemat dari administrasi dan pengurangan proporsi gaji digunakan untuk program yang langsung meningkatkan kualitas belajar siswa.

##### **Strategi Peningkatan Kualitas Guru:**

Guru yang berada di kota berlebih wajib ditugaskan ke daerah terpencil selama 2 tahun dengan mendapat insentif tambahan 30% dari gaji. Setiap guru wajib mengikuti pelatihan 100 jam per tahun, setengahnya belajar daring lewat platform Guru Belajar & Berbagi dan setengahnya lagi luring lewat KKG atau MGMP dengan mentoring. Sertifikasi ulang guru dikaitkan dengan hasil

pelatihan, jadi guru yang tidak ikut pelatihan tidak bisa perpanjang sertifikat. Guru di sekolah yang progres literasi dan numerasi siswanya tertinggi mendapat bonus kinerja.

### **Digitalisasi Sekolah:**

Tahun 1–2 fokus membangun WiFi dan lab komputer di 500 sekolah desa hingga 100% sekolah desa punya akses internet. Tahun 3–4 mendistribusikan tablet untuk 50% siswa SD dan SMP desa dengan target 1 juta tablet terdistribusi. Tahun 5 mengintegrasikan platform pembelajaran daring dengan target 100% guru aktif mengajar daring. Semua infrastruktur digital dibangun oleh swasta lewat kerjasama PPP, pemerintah hanya bayar sewa secara bertahap selama 5 tahun.

### **Mekanisme Monitoring dan Evaluasi:**

Digunakan dashboard online yang terintegrasi antara data Dapodik dan hasil Asesmen Nasional untuk memantau kemajuan secara real-time. Indikator yang dipantau adalah skor literasi dan numerasi siswa, rasio guru dan siswa di desa, persentase sekolah ber-WiFi, persentase guru yang sudah terlatih, dan tingkat ketimpangan kota-desa. Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan oleh tim independen dari universitas dan organisasi masyarakat sipil. Anggaran selanjutnya dirilis tergantung kinerja, jadi jika target tercapai baru anggaran tahun berikutnya cair.